

	News Title : Biaya Transaksi CPO di Bursa Berjangka Akan Kompetitif dengan Malaysia	
	Media Name : fortuneidn.com	Journalist : Eko Wahyudi
	Publish Date : 30 June 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Olvy Andrianita (Sekretaris Bappebti), Farid Amir (Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Ditjen Daglu Kemendag)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : News	Topic : Ekspor CPO

Home > News > Biaya Transaksi CPO di Bursa Berjangka Akan Kompetitif dengan Malaysia

Biaya Transaksi CPO di Bursa Berjangka Akan Kompetitif dengan Malaysia

Perlu ada sosialisasi mekanisme ekspor lewat bursa.



PELAYAN DI PERKOTAAN KELUAR SAKIT SUDAH BERKURANG. SUDAH BERKURANG SUDAH BERKURANG KE PANTAI KELUAR SAKIT. KUALAHUMPUR, 13 MARET 2018

BY EKO WAHYUDI

30 June 2023



Jakarta, FORTUNE – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bursa CPO yang ditunjuk pemerintah harus terpercaya, baik di pasar domestik maupun internasional.

Bursa tersebut juga harus mampu memberikan layanan yang optimal kepada pelaku usaha, serta memiliki biaya transaksi CPO yang kompetitif atau minimal sama dengan biaya transaksi CPO yang dilakukan selama ini oleh pelaku usaha Indonesia di bursa Malaysia.

Hai tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sekaligus Pih Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Iry Karim.

"Diharapkan kebijakan yang akan dijalankan dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan kontrak jangka panjang (*long term contract*) dan mudah dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, diperlukan pelatihan dan sosialisasi terkait tata cara serta mekanisme ekspor melalui bursa berjangka kepada pelaku usaha," kata dia dalam keterangan resminya, Kamis (29/6).

Menurut Iry, pembentukan bursa berjangka untuk ekspor CPO sudah searah dengan amarah Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 1997 sebagaimana diamandemen menjadi UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Baca Juga

• Mengadopsi Bursa CPO Lokal Bakal Rilis Juni Ini

Hanya CPO tertentu yang masuk ke dalam bursa

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Farid Amir, mengatakan kebijakan ekspor melalui bursa berjangka komoditi hanya akan mengatur CPO dengan kode HS15111000.

Kebijakan tersebut tidak berlaku untuk produk turunan dari CPO dengan kode tersebut. Menurut Amir, produk CPO dengan kode HS15111000 dipilih lantaran volumenya tidak terlalu besar sehingga tidak menimbulkan guncangan besar saat diimplementasikan.

Farid menjelaskan bahwa secara garis besar tidak ada perubahan signifikan pada alur bisnis kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka. Hanya saja ada penambahan satu proses sebelum ekspor dilakukan ekspor CPO, yaitu harus ditransaksikan di bursa berjangka. Lalu, bukti pembelian CPO dapat diterbitkan oleh bursa. Nantinya, bukti pembelian tersebut menjadi dokumen yang akan digunakan dalam pemrosesan Perizinan Ekspor (PE).

"Pihak-pihak yang berhak melakukan ekspor adalah Eksporir Terdaftar (ET) dan memiliki Hak Ekspor (HE) yang diperoleh dari pemenuhan atas kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan/atau dari pihak yang mengalihkan HE atas pemenuhan DMO," kata Farid.

Baca Juga

• Index Bursa CPO Bakal Utamakan Ating dan Bugutan Petani

Rancangan aturan terkait bursa CPO

Sementara itu, Sekretaris Bappebti, Olvy Andrianita, menjelaskan tentang Rancangan Peraturan Bappebti dan Rancangan Peraturan serta Tata Tertib Bursa.

Menurutnya, Rancangan Peraturan Bappebti tentang Petunjuk Teknis Perdagangan Pasar Fisik untuk Ekspor CPO mengatur, antara lain, tata kelola bursa CPO dan lembaga kliring CPO, persyaratan perizinan bursa CPO dan lembaga kliring CPO, tata cara perdagangan di bursa CPO, mekanisme pengawasan oleh Bappebti dan bursa CPO, mekanisme penyelesaian perselisihan dan *force majeure*.

Kemudian, Peraturan Tata Tertib (PTT) ekspor CPO melalui bursa berjangka berisi ketentuan lebih detail yang mencakup persyaratan dan tata cara penerimaan peserta penjual/peserta pembeli, hak dan kewajiban peserta penjual/peserta pembeli, biaya jaminan transaksi, mekanisme pengawasan, mekanisme penyerahan fisik CPO dan *force majeure*.

"Dalam prosesnya, ketiga kebijakan/ketentuan teknis tersebut harus komprehensif dan sinergis sehingga perlu mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan. Kebijakan ekspor CPO juga harus sejalan dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan CPO dalam negeri, sehingga tidak memberatkan pelaku usaha," kata Olvy.

Most Popular



TECH

9 Cara Live di TikTok untuk Pemula, Mudah!

29 June 2023



NEWS

Defiar 11 Negara ASEAN Terbaru 2023, Beserta Faktanya!

29 June 2023



LISTING

15 Motor Termahal di Dunia 2023, Mencapai Ratusan Miliar Rupiah!

29 June 2023



LISTING

10 Mall Terbesar di Indonesia, Mana yang Paling Favorit?

29 June 2023



NEWS

Jumlah Provinsi di Indonesia Lengkap dengan Ibu Kotanya Terbaru

29 June 2023



MARKET

Emiten Grup Salim INDF dan ICBP Bagi Dividen, Cek Jadwalnya

29 June 2023